Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

Implementasi Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Akhlak pada Siswa SMA PGRI 22 Serpong Tangerang Selatan

Tono Hermanto[1*], Toyyibudin[2], Yuyun Yunadi[3], Ahmad Sujai[4], Sahya Anggara[5]
[1-5] Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Depok
*Corresponding Email: tonohermanto64@gmail.com

Abstrak: Pentingnya BK, khususnya bagi siswa SMA yang sedang bertransisi dari masa remaja ke dewasa, menjadi landasan penelitian ini. Pertumbuhan moral sangat penting. Karena mereka hidup di zaman kemajuan teknologi yang pesat, mereka membutuhkan perkembangan moral untuk mempersiapkan diri menghadapi kesulitan di masa depan. Perubahan ini sangat penting untuk membina generasi muda menjadi individu yang memiliki karakter moral yang tinggi di samping kemampuan teknologi mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengembangan moral diterapkan pada siswa kelas sebelas di SMA PGRI 22 Serpong yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan melalui penggunaan layanan bimbingan dan konseling. Studi ini berupaya mengidentifikasi kesulitan dalam mengintegrasikan pengembangan moral ke dalam konseling dan bimbingan siswa, serta mengusulkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Untuk memahami proses implementasi kebijakan secara komprehensif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini menekankan enam variabel kunci yang saling memengaruhi dalam proses implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana serta kondisi sosial-ekonomi-politik,. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan metode ilmiah naturalistik bersama dengan perspektif fenomenologis untuk mengumpulkan data yang andal. Data ini dianalisis secara cermat menggunakan metodologi yang dipilih untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh. Berbagai metode digunakan untuk pengumpulan data, termasuk wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian layanan bimbingan dan konseling secara efektif menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai tradisional. Meskipun menghadapi kesulitan selama pelaksanaan bimbingan dan konseling, para konselor menunjukkan dedikasi yang teguh terhadap tanggung jawab mereka. Pada kenyataannya, para konselor secara konsisten terlibat dengan setiap masalah yang disampaikan oleh siswa, membantu mereka menemukan solusi atas masalah mereka.
Kata kunci: Implementasi, Bimbingan Konseling, Pembinaan Akhlak Siswa.

Abstract: *The importance of Guidance and Counseling (BK), particularly for eleventh-grade students who are transitioning from adolescence to adulthood, serves as the foundation for this study. Moral growth is essential. Because they live in a time of rapid technological advancement, they need moral development to get ready for the difficulties ahead. This change is essential for fostering the younger generation into people who have a high moral character in addition to their technological aptitude. The aim of this research was to analyze how moral development is applied for eleventh- grade students at SMA PGRI 22 Serpong located in South Tangerang City through the use of guidance and counseling services. The study sought to identify the difficulties in incorporating moral development into student counseling and guidance, as well as to propose solutions to address these challenges. To achieve a comprehensive view of the implementation process, this research applies the policy implementation model of Donald Van Meter and Carl Van Horn. Their framework highlights six interconnected variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, socio-economic and political conditions, and the disposition of the implementers themselves. The approach taken in this research was qualitative, utilizing naturalistic scientific methods along with a phenomenological perspective to gather reliable data. This data was meticulously analyzed using the chosen methodology to furnish thorough explanations. Various methods were used for data collection, including interviews, document reviews, and observations. The results of the study reveal that the delivery of guidance and counseling services effectively merges Islamic principles with traditional values. Even with the difficulties faced during the execution of guidance and counseling, the counselors showed unwavering dedication to their responsibilities. In reality, the counselors consistently engaged with each issue presented by the students, assisting them in discovering resolutions to their concerns.*
Keywords: *Implementation, Guidance and Counseling, Student Moral Development*

PENDAHULUAN

Setiap orang membutuhkan pendidikan yang solid. Pendidikan bukan hanya tentang mempelajari hal-hal baru; pendidikan juga memberi setiap orang kesempatan untuk meningkatkan karakter dan

kebiasaan mereka. Saat ini, siswa menunjukkan tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial, seperti menggunakan bahasa vulgar, berpakaian sembarangan, dan memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, guru, dan teman sekelas mereka. Akibatnya, reformasi diperlukan di berbagai sektor, terutama dalam cara siswa belajar dan guru mengajar. Selain mempelajari pengetahuan dan keterampilan, siswa di sekolah harus dibekali untuk mengembangkan kecerdasan emosional yang tinggi yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka agar siap menghadapi kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman pendidikan di sekolah harus berfokus pada membantu siswa mengenali bakat mereka, memahami peluang dan tantangan lingkungan yang mungkin mereka hadapi, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan sebagai anggota masyarakat yang mandiri dan produktif, sehingga mereka dapat menjadi lulusan yang mereka inginkan.

Perlu dilakukan investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan, yang tentu saja harus selaras dengan tujuan dan fungsi pendidikan sebagaimana didefinisikan dalam Bab I, Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2003. Mengenai Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa, "Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar sehingga siswa secara aktif mengembangkan potensi mereka untuk memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, karakter mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara." Menurut undang-undang tersebut, penulis berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk meningkatkan kapasitas seseorang dalam ketahanan spiritual dan keagamaan, disiplin diri, karakter, kecerdasan, prinsip moral, dan bakat yang bermanfaat tidak hanya untuk kebutuhan diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat, negara, dan negara.

Selain itu, tujuan pendidikan seharusnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran individu, dalam kerangka ini, pendidikan nasional sesuai dengan pandangan Islam, yang memandang manusia sebagai entitas yang bergerak maju menuju kesejahteraan baik di dunia ini maupun di akhirat. Pada dasarnya, pendidikan Islam dipandang sebagai proses yang mempersiapkan individu muda untuk menjalani hidup mereka dan mencapai aspirasi mereka dengan lebih sukses dan efisien. Pendidikan Islam berfungsi sebagai panduan yang menyelaraskan unsur fisik dan spiritual sambil berakar pada hukum Islam, yang pada akhirnya membentuk identitas fundamental yang mengikuti nilai-nilai Islam. Ia sering menggambarkan identitas fundamental ini sebagai identitas yang mewujudkan prinsip-prinsip Islam dan menerima kewajiban yang sesuai. Proses pendidikan Islam, yang bertujuan untuk membina individu baik dalam ranah spiritual maupun fisik, sangat penting dan harus dilakukan secara bertahap, oleh karena itu, perjalanan pematangan, yang mengarah pada pertumbuhan atau perkembangan optimal, hanya dapat dicapai melalui serangkaian langkah progresif yang mengarah pada tujuan akhir pengembangan.

Tujuan utama pendidikan Islam berfokus pada dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mencapai kesempurnaan manusia, dengan titik tertinggi adalah kedekatan dengan Allah. Tujuan kedua adalah mencapai kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Oleh karena itu, Al-Ghazali percaya bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kedua tujuan ini secara bersamaan. Akibatnya, dengan meneliti pembahasan yang disebutkan di atas, kita menemukan bahwa tujuan pendidikan Islam mencakup dua aspek utama: mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, dan Allah SWT memberikan kehormatan dan pernyataan sebelumnya menekankan perlunya memiliki keinginan yang kuat untuk mencari ilmu, berpikiran terbuka, mencari kesempatan untuk mengikuti kegiatan akademik, mengembangkan kecintaan terhadap belajar, mengumpulkan sumber daya penting untuk meningkatkan pemahaman kita, dan secara teratur memperkuat keyakinan dan komitmen kita.

Pertumbuhan pendidikan Islam yang kini selaras dengan perubahan teknologi yang pesat saat ini, banyak teknologi baru dan berkembang pesat telah muncul, memengaruhi bagaimana kaum muda berinteraksi dengan orang lain baik dengan cara yang baik maupun buruk. Dampak positifnya tentu patut diakui karena memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Salah satu keuntungannya adalah membantu membentuk karakter dan moral siswa, memungkinkan mereka menghadapi tantangan dunia digital saat ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tindakan mereka. di sisi lain, penting

untuk menyadari bahwa teknologi juga dapat berdampak negatif pada pengguna, menyebabkan masalah seperti ancaman, pencurian, penipuan, dan banyak lagi. Teknologi ini cukup bermanfaat bagi orang dewasa karena memudahkan pekerjaan dan membantu menangkal pengaruh buruk. Namun, hal ini berbeda bagi remaja, yang dalam konteks ini adalah pelajar, karena mereka seringkali tidak sepenuhnya memahami cara menggunakan teknologi dengan benar, yang dapat menyebabkan dampak negatif seperti perundungan siber.

Selain itu, siswa dapat dengan mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif lainnya, seperti kebosanan, apatis, ketidaksabaran, preferensi terhadap kepraktisan, dan keinginan untuk menemukan solusi cepat untuk masalah. Meskipun demikian, ada keuntungannya, termasuk peningkatan kreativitas dan peningkatan kepercayaan diri. Hal ini dapat menghasilkan keinginan untuk pengakuan dan ketergantungan yang berkelanjutan pada teknologi. Akibatnya, pelajar di era kontemporer ini membutuhkan bantuan yang cermat. Hal ini membutuhkan seorang mentor yang memahami berbagai keadaan yang dihadapi siswa. Guru bimbingan dan konseling, yang berperan sebagai konselor, memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini. Siswa akan mempelajari tentang layanan yang tepat yang harus ditawarkan oleh pendidik untuk mendukung siswa yang terdampak oleh era milenial, dengan bantuan dari instruktur bimbingan dan konseling.

Tujuan bimbingan dan konseling adalah agar seorang mentor (konselor) mendukung individu melalui sesi tatap muka atau hubungan timbal balik, memungkinkan klien untuk memperoleh pemahaman dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan pribadi mereka. Atau pendekatan di mana seorang konselor memberikan dukungan atau bantuan terstruktur kepada konseli (siswa) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara kedua pihak, yang bertujuan untuk mengungkap masalah yang dihadapi oleh konseli. Proses ini memungkinkan konseli untuk mengenali masalah mereka sendiri, menerima identitas mereka berdasarkan kemampuan mereka, dan, pada akhirnya, memperoleh kapasitas untuk menyelesaikan tantangan mereka sendiri.

Situasi ini sangat penting bagi sekolah untuk menyediakan layanan konseling dan nasihat yang dirancang untuk membantu siswa yang sering melanggar peraturan dan kebijakan sekolah. Layanan ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan etika dan perilaku sebagai bagian dari pengembangan karakter siswa, selain membantu mereka mengatasi tantangan akademis mereka. Siswa adalah anggota masyarakat yang membutuhkan interaksi dan partisipasi sosial. Akibatnya, sangat penting bagi siswa untuk siap memahami hukum dan kewajiban yang menyertai menjadi anggota sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Aturan-aturan ini biasanya berbentuk seperangkat prinsip, norma sosial, dan sudut pandang yang membentuk kerangka budaya yang mengarahkan kehidupan mereka.

Secara sederhana, BK dirancang untuk mengarahkan individu ke arah yang lebih positif. BK sering kali berkaitan dengan menumbuhkan perilaku atau etika yang mencerminkan standar yang lebih tinggi. Dalam bidang pendidikan, terdapat banyak mata pelajaran yang perlu dipelajari siswa, salah satunya adalah pendidikan moral. Pendidikan moral memungkinkan individu untuk mengelola perilaku baik dan buruk mereka secara efektif. Tujuan utama pendidikan Islam: mengembangkan manusia yang berpikiran terbuka yang berupaya untuk terhubung dengan Tuhan dan meraih kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat. Selain itu, Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan keunggulan manusia baik dalam aspek duniawi maupun abadi, di sisi lain, pendidikan moral, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, melibatkan inisiatif sadar untuk menawarkan pengajaran fisik dan spiritual yang berakar pada nilai- nilai Islam, menumbuhkan sifat-sifat karakter yang berbudi luhur yang memengaruhi perilaku seseorang, menghasilkan perubahan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Keyakinan dan prinsip siswa dibentuk oleh keluarga mereka dan lingkungan tempat mereka berada, termasuk komunitas dan sekolah mereka. Meskipun banyak anak mendapatkan pendidikan yang baik di rumah, seringkali lingkungan sosial di luar keluarga mereka tidak mendorong tindakan positif. Aspek ini penting karena cara seorang remaja membentuk karakternya dapat memengaruhi perkembangan dan pencapaian masa depannya. Pengajaran moral sangat penting dalam pendidikan Islam. Pentingnya hal ini berasal dari fakta bahwa Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, yang menyatakan bahwa beliau diutus untuk memperbaiki perilaku manusia. Mengingat latar belakang

bagaimana Islam dimulai, yang sering mengabaikan moral pribadi dan komunitas, sangat penting untuk memahami ajaran Islam untuk kemajuan manusia. Menghidupkan kembali nilai-nilai etika yang terdapat dalam Al-Quran sangat penting dan mendesak.

Siswa kelas sebelas di SMA PGRI 22 Serpong, Kota Tangerang Selatan, menunjukkan beragam sifat. Beberapa rajin, tertib, sopan, terlibat, pendiam, banyak bicara, atau lamban. Di antara karakteristik tersebut, beberapa siswa menunjukkan kecenderungan yang lebih introvert, seperti menikmati waktu sendirian, menghindari konflik saat mengalami kesulitan akademis, dan merasa tidak percaya diri untuk berbagi pikiran di kelas. Mengingat isu-isu terkait layanan bimbingan dan konseling serta tantangan etika yang dihadapi oleh generasi milenial siswa, khususnya di SMA PGRI 22 Serpong, peneliti bertujuan untuk menguraikan bagaimana bimbingan dan konseling dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan moral siswa kelas sebelas. Peneliti mengumpulkan informasi ini secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari guru bimbingan dan konseling yang mengajar siswa kelas sebelas di SMA PGRI 22 Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Keberadaan layanan dukungan dan bimbingan sangat penting untuk membantu siswa membangun nilai-nilai mereka, terutama dalam menghadapi dampak buruk perubahan modern, khususnya yang berkaitan dengan berbagai masalah di sekolah. Penelitian ini mengamati siswa kelas sebelas, karena dianggap bahwa siswa-siswa ini adalah remaja yang sering berinteraksi dengan berbagai platform media sosial. Kelompok usia ini baru memulai perjalanan sekolah menengah mereka dan membutuhkan kegiatan pengembangan moral yang berkelanjutan di sekolah untuk membantu mereka menghindari tindakan yang berbahaya dan tidak pantas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Pada penelitian ini, pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait yaitu guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan beberapa siswa, serta observasi mengenai implementasi AI sebagai media pembelajaran PAI. Pada penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang meliputi profil sekolah serta dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan Kebijakan Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Akhlak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bimbingan dan konseling (BK) dalam pembinaan akhlak di SMA PGRI 22 Serpong Tangerang Selatan telah dilaksanakan berdasarkan standar dan tujuan kebijakan yang dirumuskan secara jelas. Standar tersebut menjadi pedoman operasional bagi guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan sehingga pembinaan akhlak tidak hanya dilakukan sebagai respons terhadap munculnya pelanggaran siswa, tetapi menjadi bagian integral dari proses pendidikan di sekolah. Kejelasan standar tersebut memberikan kesamaan persepsi bagi seluruh pelaksana mengenai arah pembinaan yang hendak dicapai, yaitu membentuk peserta didik yang memiliki karakter religius, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sekolah memandang pembinaan akhlak sebagai proses pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus, bukan kegiatan yang bersifat insidental. Guru bimbingan dan konseling tidak hanya berperan menyelesaikan permasalahan siswa setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui pendampingan, pemberian motivasi, pembiasaan perilaku positif, dan penguatan nilai-nilai moral. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa layanan BK telah ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung perkembangan kepribadian peserta didik secara menyeluruh, baik pada aspek pribadi, sosial, maupun spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMA PGRI 22 Serpong, diketahui bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling diarahkan untuk memberikan pendampingan kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan siswa yang bermasalah maupun yang tidak mengalami

permasalahan. Menurut beliau, peserta didik berasal dari latar belakang keluarga yang beragam sehingga tidak semua memperoleh perhatian dan pembinaan yang memadai di lingkungan rumah. Kondisi tersebut menjadikan sekolah, khususnya guru bimbingan dan konseling, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan melalui layanan yang mampu membantu siswa memahami permasalahan yang dihadapi sekaligus memperkuat pembentukan akhlaknya. Oleh karena itu, pembinaan dilakukan melalui komunikasi yang intensif, pemberian motivasi, serta pengarahan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik.

Hasil wawancara dengan siswa kelas X, XI, dan XII semakin memperkuat temuan tersebut. Informan menyatakan bahwa guru bimbingan dan konseling bersama guru Pendidikan Agama Islam secara konsisten memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi dalam berbagai kesempatan. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui komunikasi langsung, tetapi juga memanfaatkan media pembelajaran seperti video, gambar, dan diskusi mengenai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Salah seorang siswa menjelaskan bahwa ketika pernah dipanggil karena terlambat datang ke sekolah, guru bimbingan dan konseling tidak langsung memberikan hukuman, melainkan memberikan nasihat dan motivasi agar tidak mengulangi perilaku tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan lebih menekankan pembinaan daripada pemberian sanksi, sehingga siswa didorong untuk memperbaiki perilakunya atas dasar kesadaran pribadi.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan implementasi BK di SMA PGRI 22 Serpong tidak hanya berorientasi pada terciptanya kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, tetapi juga pada proses internalisasi nilai-nilai moral dalam diri peserta didik. Guru bimbingan dan konseling berupaya membangun kesadaran bahwa perilaku positif dilakukan bukan semata-mata karena adanya pengawasan atau ancaman hukuman, melainkan karena peserta didik memahami makna serta manfaat dari perilaku tersebut bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembinaan akhlak diarahkan untuk menghasilkan perubahan perilaku yang lebih permanen karena berlandaskan kesadaran intrinsik.

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tercermin dari indikator yang digunakan sekolah dalam menilai perkembangan akhlak peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah tidak menjadikan berkurangnya jumlah pelanggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan layanan BK. Sebaliknya, penilaian lebih difokuskan pada perubahan sikap yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatnya kesopanan dalam berinteraksi dengan guru dan teman, tumbuhnya rasa hormat terhadap lingkungan sekolah, meningkatnya kedisiplinan, serta berkembangnya tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai peserta didik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sekolah memahami akhlak sebagai manifestasi nilai yang tercermin melalui kebiasaan dan perilaku nyata, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan.

Pelaksanaan tindak lanjut terhadap peserta didik yang mengalami permasalahan juga menunjukkan adanya orientasi pembinaan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, siswa yang melakukan pelanggaran tidak hanya diberikan layanan konseling satu kali, tetapi memperoleh pendampingan secara berkala hingga menunjukkan perubahan perilaku yang diharapkan. Guru bimbingan dan konseling melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa melalui komunikasi rutin, observasi perilaku di lingkungan sekolah, serta koordinasi dengan guru lain yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa tujuan kebijakan tidak berhenti pada penyelesaian kasus, melainkan diarahkan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku yang bersifat permanen.

Hasil wawancara dengan siswa memperlihatkan bahwa pendekatan yang diterapkan guru bimbingan dan konseling lebih menekankan aspek pembinaan dibandingkan penghukuman. Siswa menilai bahwa guru memberikan nasihat dengan bahasa yang santun, mudah dipahami, dan disertai alasan yang logis mengenai pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut membuat peserta didik merasa dihargai sebagai individu sehingga lebih terbuka dalam menerima arahan dan melakukan refleksi terhadap perilakunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal antara guru dan peserta didik menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan pembinaan akhlak.

Pembinaan yang dilaksanakan juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara aspek preventif dan kuratif. Pada satu sisi, sekolah berupaya mencegah munculnya perilaku menyimpang melalui

pembiasaan nilai-nilai moral, penyampaian informasi, dan kegiatan penguatan karakter. Pada sisi lain, ketika ditemukan peserta didik yang mengalami kesulitan atau menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sekolah, guru bimbingan dan konseling memberikan layanan konseling yang disesuaikan dengan akar permasalahan yang dihadapi. Keseimbangan kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada penanganan masalah, tetapi juga pada pembangunan budaya sekolah yang mendukung terbentuknya karakter peserta didik.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa evaluasi program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi kebijakan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling secara berkala menilai efektivitas layanan yang telah diberikan dengan membandingkan kondisi peserta didik sebelum dan sesudah memperoleh pendampingan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada perubahan perilaku siswa, tetapi juga pada kesesuaian metode, materi, dan strategi layanan yang digunakan. Ketika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan tertentu belum memberikan perubahan yang optimal, guru melakukan penyesuaian terhadap bentuk layanan maupun teknik konseling yang diterapkan. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu yang memungkinkan program bimbingan dan konseling terus berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Praktik tersebut sejalan dengan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui koordinasi, pengawasan, serta evaluasi yang berkesinambungan. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi lintas unsur sekolah dan mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah bergerak melampaui aspek administratif menuju proses pembelajaran organisasi (organizational learning), yaitu proses ketika hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas layanan pada periode berikutnya.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pembinaan akhlak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan, tetapi juga oleh terciptanya lingkungan sekolah yang mendukung internalisasi nilai-nilai moral. Guru Pendidikan Agama Islam, wali kelas, dan tenaga pendidik lainnya memberikan penguatan terhadap pesan-pesan moral yang disampaikan dalam layanan bimbingan dan konseling melalui keteladanan, pembiasaan, serta pengawasan terhadap perilaku peserta didik dalam aktivitas sehari-hari. Sinergi tersebut menghasilkan konsistensi pesan pendidikan sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sama dari berbagai pihak di lingkungan sekolah. Kondisi ini memperkuat proses internalisasi nilai karena siswa tidak hanya menerima nasihat melalui layanan BK, tetapi juga melihat implementasi nilai tersebut dalam budaya sekolah.

Analisis terhadap keseluruhan temuan menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan implementasi bimbingan dan konseling di SMA PGRI 22 Serpong telah diwujudkan melalui sistem pembinaan yang terencana, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik. Standar kebijakan memberikan arah yang jelas mengenai bentuk layanan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi, sedangkan tujuan kebijakan diwujudkan melalui upaya membangun kesadaran moral peserta didik agar mampu menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan akhlak tidak dipahami sebagai proses penegakan disiplin semata, tetapi sebagai proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami, menerima, dan mengamalkan nilai-nilai moral secara sadar.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa implementasi bimbingan dan konseling dalam pembinaan akhlak di SMA PGRI 22 Serpong telah memenuhi karakteristik implementasi kebijakan yang efektif sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Kejelasan standar dan tujuan kebijakan mampu diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk layanan yang sistematis, didukung oleh koordinasi antar pelaksana, dilaksanakan melalui pendekatan yang edukatif dan humanis, serta dievaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program. Implementasi tersebut menghasilkan proses pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada penurunan angka pelanggaran, tetapi juga pada tumbuhnya kesadaran moral, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemampuan peserta didik menginternalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, standar dan tujuan kebijakan bimbingan dan konseling tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi

pedoman operasional yang mampu mengarahkan seluruh proses pembinaan karakter secara sistematis, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

Ketersediaan Sumber Daya (Tenaga Kerja, Dana, Fasilitas, dan Informasi) Implementasi Bimbingan Konseling

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya menjadi salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dalam pembinaan akhlak di SMA PGRI 22 Serpong Tangerang Selatan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, dukungan anggaran, fasilitas pendukung, serta ketersediaan informasi yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan BK. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan layanan yang bertujuan membentuk karakter dan akhlak peserta didik secara berkelanjutan.

Dari aspek sumber daya manusia, penelitian menemukan bahwa guru BK memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling serta memiliki kompetensi dalam melaksanakan layanan kepada peserta didik. Pelaksanaan layanan tidak hanya menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling konvensional, tetapi juga dipadukan dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar pembinaan akhlak. Guru BK memberikan berbagai layanan, seperti layanan orientasi, layanan informasi, konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, serta melakukan identifikasi kebutuhan siswa melalui Daftar Cek Masalah (DCM). Sebagaimana disampaikan oleh guru BK, proses layanan diawali dengan mengidentifikasi bentuk permasalahan siswa, menelusuri penyebabnya, memberikan bimbingan secara persuasif, kemudian melakukan pemantauan terhadap perkembangan perilaku siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan fungsi layanan BK secara sistematis.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa jumlah guru BK yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang harus dilayani. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja guru BK relatif tinggi sehingga intensitas pendampingan individual belum dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, beberapa peserta didik yang memerlukan pendampingan secara berkelanjutan belum memperoleh layanan yang maksimal. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh kompetensi pelaksana, tetapi juga oleh kecukupan jumlah personel yang memungkinkan pelayanan diberikan secara efektif kepada seluruh sasaran kebijakan.

Temuan tersebut sejalan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang menempatkan sumber daya sebagai salah satu variabel utama keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut model tersebut, implementasi tidak hanya bergantung pada kejelasan tujuan kebijakan, tetapi juga pada tersedianya sumber daya manusia yang memadai, baik dari aspek kompetensi maupun kuantitas. Dalam konteks penelitian ini, kompetensi guru BK telah mendukung pelaksanaan pembinaan akhlak, namun keterbatasan jumlah pelaksana menyebabkan efektivitas layanan belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu pelaksana, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam menyediakan tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Akur dan Juntika (2005) yang menyatakan bahwa keberhasilan layanan bimbingan dan konseling dipengaruhi oleh pengelolaan organisasi, administrasi, dan koordinasi yang baik antarunsur sekolah. Penelitian ini juga menguatkan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kompetensi konselor saja belum cukup untuk menghasilkan layanan yang efektif apabila belum didukung oleh kecukupan fasilitas, sistem informasi yang terintegrasi, serta partisipasi aktif keluarga dalam mendukung perkembangan peserta didik. Dengan demikian, implementasi BK dalam pembinaan akhlak memerlukan sinergi antara sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan dukungan informasi agar seluruh program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA PGRI 22 Serpong Tangerang Selatan telah memiliki sumber daya yang relatif memadai untuk melaksanakan program Bimbingan dan Konseling dalam pembinaan akhlak. Kompetensi guru BK, dukungan anggaran, ketersediaan fasilitas layanan, serta sistem penyebaran informasi menjadi modal penting dalam mendukung implementasi

kebijakan tersebut. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan, terutama pada jumlah guru BK, kelengkapan sarana pembinaan keagamaan, serta kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan keluarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam mengelola dan mengintegrasikan seluruh sumber daya tersebut secara optimal untuk mendukung pembentukan akhlak peserta didik. Dengan demikian, dimensi resources dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) terbukti menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan layanan BK dalam mencapai tujuan pembinaan akhlak di SMA PGRI 22 Serpong Tangerang Selatan.

Karakteristik Pelaksana Implementasi Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Akhlak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana bimbingan dan konseling (BK) di SMA PGRI 22 Serpong menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan akhlak siswa. Guru BK tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pelaksana layanan konseling, tetapi juga berperan sebagai pendamping, pembimbing, sekaligus motivator yang membantu peserta didik mengembangkan karakter dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran Islam. Peran tersebut tercermin dari kemampuan konselor membangun hubungan interpersonal yang positif dengan siswa sehingga proses pembinaan berlangsung dalam suasana yang terbuka dan penuh kepercayaan.

Berdasarkan hasil wawancara, guru BK memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya serta terus berupaya meningkatkan kompetensi melalui pelatihan maupun kegiatan pengembangan profesional. Kompetensi tersebut mendukung kemampuan konselor dalam memahami kondisi psikologis siswa, mengidentifikasi permasalahan, serta menentukan bentuk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pengalaman yang dimiliki juga membantu guru BK menghadapi berbagai karakter siswa dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan persuasif.

Pelaksanaan layanan BK di SMA PGRI 22 Serpong telah didukung oleh program kerja yang terstruktur. Guru BK menyusun program tahunan dan program tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Program tahunan meliputi layanan konseling individu, bimbingan kelompok, konsultasi, mediasi, dan kunjungan rumah apabila diperlukan. Sementara itu, program tambahan diarahkan pada pembinaan akhlak melalui kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, salat duha, pembiasaan berjabat tangan dengan guru, program Jumat Taqwa, Jumat Bersih, serta bimbingan membaca Al-Qur'an yang melibatkan seluruh guru.

Guru BK juga menjelaskan bahwa proses penanganan masalah siswa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi bentuk pelanggaran atau permasalahan, menelusuri penyebab munculnya perilaku tersebut, memberikan layanan bimbingan dan konseling secara persuasif, kemudian melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa. Selain itu, konselor memanfaatkan berbagai instrumen, termasuk Daftar Cek Masalah (DCM), sebagai dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik sebelum menentukan bentuk layanan yang diberikan. Dalam pelaksanaan layanan, guru BK memperoleh alokasi waktu khusus di setiap kelas untuk memberikan materi bimbingan dan konseling. Di luar jadwal tersebut, konselor tetap membuka layanan bagi siswa yang membutuhkan pendampingan secara individual tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran. Sistem ini memungkinkan siswa memperoleh bantuan kapan pun ketika menghadapi persoalan akademik, sosial, maupun pribadi.

Kompetensi akademik dan profesional guru BK menunjukkan bahwa implementor memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan kebijakan. Kemampuan melakukan identifikasi masalah melalui DCM, menyusun program tahunan, memberikan layanan konseling individual maupun kelompok, serta melakukan evaluasi perkembangan siswa mencerminkan pelaksanaan fungsi BK yang sesuai dengan standar profesional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya (Van Meter & Van Horn, 1975). Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa guru BK mengintegrasikan layanan konseling dengan pembiasaan keagamaan melalui berbagai program religius di sekolah. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan akhlak tidak hanya dilakukan melalui layanan konseling formal, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan konsep bimbingan dan konseling Islam yang

menempatkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan dalam membantu individu mengembangkan potensi spiritual, moral, dan sosialnya (Amin, 2013).

Karakteristik personal guru BK berupa empati, kesabaran, kemampuan komunikasi, dan sikap menjaga kerahasiaan turut memperkuat efektivitas hubungan konseling. Hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya mendorong siswa lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan sehingga konselor dapat memberikan intervensi yang lebih tepat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembinaan akhlak tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur layanan, tetapi juga oleh kualitas interaksi interpersonal antara konselor dan peserta didik. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan jumlah guru BK dibandingkan jumlah siswa. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja konselor menjadi tinggi sehingga pelayanan individual belum dapat dilakukan secara optimal. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana yang baik belum sepenuhnya mampu menghasilkan implementasi yang optimal apabila tidak didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan jumlah konselor serta penguatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang penting untuk meningkatkan efektivitas pembinaan akhlak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana implementasi BK di SMA PGRI 22 Serpong telah mendukung keberhasilan pembinaan akhlak siswa. Kompetensi profesional, pengalaman, kemampuan komunikasi, serta komitmen terhadap pelayanan menjadi kekuatan utama dalam implementasi program. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan, terutama penambahan tenaga konselor dan peningkatan kapasitas organisasi, sehingga implementasi kebijakan bimbingan dan konseling dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Sifat dan Karakteristik Murid dalam Implementasi Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Akhlak

Implementasi Bimbingan dan Konseling (BK) dalam pembinaan akhlak di SMA PGRI 22 Serpong memperlihatkan karakter implementasi kebijakan pendidikan yang bersifat kompleks, adaptif, dan multi-layered, di mana tujuan normatif pembentukan karakter diterjemahkan ke dalam praktik layanan yang mencakup orientasi, informasi, konseling, serta pembiasaan nilai religius. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, implementasi ini menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan telah terinstitusionalisasi secara cukup jelas, namun efektivitasnya tidak ditentukan oleh kejelasan tujuan semata, melainkan oleh interaksi simultan antara variabel implementasi yang bersifat struktural (resources, communication, implementor disposition) dan variabel kontekstual (target group characteristics dan environmental conditions). Dengan demikian, implementasi BK tidak bekerja sebagai mekanisme linear, tetapi sebagai sistem adaptif yang terus bernegosiasi dengan realitas sosial siswa.

Pada level karakteristik kelompok sasaran, ditemukan adanya spektrum heterogenitas yang signifikan dalam struktur psikososial siswa. Sebagian siswa menunjukkan moral readiness, yakni kesiapan awal dalam menerima nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap hormat, yang mencerminkan adanya internalisasi nilai pada tahap awal. Kelompok ini menunjukkan respons positif terhadap intervensi BK karena telah memiliki struktur kognitif dan afektif yang selaras dengan tujuan pembinaan akhlak. Namun, terdapat pula kelompok siswa dengan karakter withdrawal, rendah self-efficacy, serta hambatan ekspresi sosial, yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan psikologis berupa rasa aman dan penerimaan sosial. Di sisi lain, terdapat pula siswa dengan high social dominance yang menunjukkan kecenderungan interaksi aktif, tetapi membutuhkan reorientasi nilai pada dimensi empati dan kontrol diri. Heterogenitas ini memperkuat argumen Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan akan selalu menghasilkan differentiated outcomes karena target group tidak bersifat homogen secara perilaku maupun psikologis.

Dalam kerangka psikologi sosial, variasi tersebut dapat dipahami melalui social learning theory Bandura, yang menjelaskan bahwa internalisasi nilai moral tidak hanya berlangsung melalui instruksi

formal, tetapi juga melalui observasi, imitasi, dan reinforcement sosial. Keberadaan siswa dengan kedewasaan moral yang lebih stabil berfungsi sebagai behavioral model yang mempercepat difusi nilai dalam sistem sosial sekolah. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa implementasi BK memiliki dimensi horizontal yang sering kali lebih kuat daripada intervensi vertikal, karena nilai akhlak tidak hanya ditransmisikan oleh konselor, tetapi juga direproduksi dalam interaksi antar siswa.

Pada saat yang sama, lingkungan eksternal memperlihatkan fungsi sebagai competing normative system yang mengganggu stabilitas internalisasi nilai. Media sosial dan tekanan teman sebaya menciptakan ruang diskursif alternatif yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang dibangun di sekolah. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi ini merupakan environmental constraint yang memperluas arena implementasi kebijakan ke ranah eksternal institusi, sehingga efektivitas BK tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan internal, tetapi juga oleh kemampuan institusi pendidikan dalam mengelola tekanan ekosistem sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembinaan akhlak harus dipahami sebagai proses ekologis, bukan institusional semata.

Dimensi implementor dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guru BK tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai agen interpretatif yang mengonstruksi ulang tujuan kebijakan dalam bentuk praktik kontekstual. Hal ini terlihat dari penggunaan layanan tidak hanya dalam bentuk formal (konseling, informasi, orientasi), tetapi juga melalui pembiasaan nilai seperti pembacaan Al-Qur'an, Hadis, serta konsumsi media edukatif. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan adanya high degree of discretion pada level implementor, yang dalam teori Van Meter dan Van Horn dapat meningkatkan efektivitas implementasi apabila selaras dengan tujuan kebijakan, namun juga berpotensi menciptakan variasi implementasi apabila tidak terkontrol secara sistemik.

Relasi sosial siswa berfungsi sebagai struktur mediasi yang menentukan efektivitas internalisasi nilai. Sense of belonging dalam kelompok sosial meningkatkan keterbukaan terhadap layanan BK, sedangkan isolasi sosial menghasilkan resistensi terhadap intervensi nilai. Dalam perspektif implementasi kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa outcomes kebijakan tidak hanya ditentukan oleh input program, tetapi juga oleh struktur relasi sosial yang mengikat individu dalam komunitas sekolah. Dengan demikian, internalisasi akhlak merupakan hasil interaksi antara struktur kebijakan dan struktur sosial yang melekat pada individu.

Pada level institusional, implementasi BK memperlihatkan karakter multi-actor governance, di mana kepala sekolah, guru, konselor, dan orang tua berperan sebagai jaringan koordinatif dalam pembentukan konsistensi nilai. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, inter-organizational communication menjadi variabel kunci dalam memastikan coherence implementasi, karena pembinaan akhlak tidak dapat bergantung pada satu aktor tunggal. Konsistensi nilai hanya dapat dicapai apabila terdapat keselarasan interpretasi kebijakan di antara seluruh aktor pendidikan, dengan demikian implementasi Bimbingan dan Konseling dalam pembinaan akhlak di SMA PGRI 22 Serpong dapat direkonstruksi sebagai sistem implementasi kebijakan yang bersifat kompleks, non-linear, dan ekosistemik. Outcome pembinaan akhlak tidak dapat dipahami sebagai hasil langsung dari intervensi layanan, tetapi sebagai emergent property yang muncul dari interaksi antara desain kebijakan, kapasitas implementor, heterogenitas target group, tekanan lingkungan eksternal, serta struktur relasi sosial. Dalam kerangka ini, implementasi BK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendidikan karakter, tetapi juga sebagai arena negosiasi nilai yang berlangsung secara simultan pada level individual, sosial, dan institusional.

Komunikasi antar Pelaksana Kebijakan Implementasi Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Akhlak

Komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam implementasi Bimbingan dan Konseling (BK) di SMA PGRI 22 Serpong menunjukkan konfigurasi sistem komunikasi yang bersifat multi-saluran, mencakup komunikasi formal, informal, digital, pedagogis, serta eksternal berbasis keluarga. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi berfungsi sebagai variabel kunci yang menentukan derajat konsistensi implementasi kebijakan melalui mekanisme transmisi standar kebijakan kepada seluruh aktor. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berlangsung secara

struktural, tetapi juga mengalami perluasan melalui media digital, praktik pedagogis, dan intervensi berbasis keluarga.

Level implementor, guru BK menjalankan komunikasi kebijakan melalui pendekatan multi-metode yang mencakup ceramah moral, penggunaan kisah keteladanan Nabi dan sahabat, serta integrasi media pembelajaran seperti proyektor LCD untuk meningkatkan daya tangkap siswa. Pendekatan ini diperkuat dengan strategi komunikasi personal dalam bentuk konseling individual dan kelompok, yang digunakan untuk menangani permasalahan siswa secara lebih spesifik. Selain itu, layanan informasi dan orientasi digunakan sebagai instrumen awal pembentukan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai moral dan fungsi BK itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi BK tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat layered communication strategy yang menggabungkan pendekatan kognitif, afektif, dan relasional.

Dimensi komunikasi juga mengalami transformasi melalui integrasi teknologi digital. Guru BK memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter sebagai kanal komunikasi dengan siswa, termasuk untuk konsultasi informal dan pemantauan perilaku. Selain itu, praktik e-konseling melalui pesan singkat (SMS dan aplikasi chatting) menunjukkan adanya pergeseran dari komunikasi institusional formal menuju komunikasi berbasis kedekatan digital (digital proximity communication). Siswa juga diketahui menggunakan kanal ini untuk menyampaikan masalah secara spontan, menunjukkan bahwa komunikasi BK telah menjadi bagian dari kehidupan digital siswa, bukan hanya layanan institusional. Selain itu, penggunaan media pembelajaran seperti video, film, Macromedia Flash, permainan edukatif, serta perangkat teknologi seperti laptop, pemutar MP3/MP4, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi BK juga berbasis multimedia engagement system. Namun demikian, penggunaan teknologi ini masih bersifat instrumental dan belum terintegrasi dalam satu sistem komunikasi kebijakan yang baku, sehingga masih berada pada tahap fragmented digital adoption.

Perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara komunikasi kebijakan, karakteristik pelaksana, dan karakteristik target group. Variasi komunikasi yang terjadi di SMA PGRI 22 Serpong mencerminkan bahwa implementasi BK bersifat non-linear, di mana efektivitas tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi oleh kualitas relasi komunikasi antar aktor.

Pada dimensi evaluasi dan kontrol, komunikasi berfungsi sebagai feedback mechanism yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program BK. Diskusi evaluatif antara kepala sekolah dan guru BK digunakan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi serta merumuskan perbaikan strategi. Selain itu, dilakukan juga monitoring terhadap siswa melalui kolaborasi antar guru serta pelibatan orang tua, yang menunjukkan bahwa komunikasi berfungsi sebagai siklus kontrol kebijakan yang bersifat berkelanjutan.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi BK di SMA PGRI 22 Serpong membentuk sistem komunikasi kebijakan yang bersifat hybrid, multi-layered, dan network-based. Sistem ini mencakup komunikasi formal, informal, digital, pedagogis, serta eksternal keluarga, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam mendukung pembinaan akhlak. Namun, sistem ini masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi komunikasi antar aktor, ketidakseimbangan partisipasi orang tua, serta belum terintegrasinya teknologi komunikasi dalam satu sistem kebijakan yang utuh. Dengan demikian, dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), efektivitas implementasi BK sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam membangun sistem komunikasi yang terintegrasi, konsisten, dan kolaboratif lintas seluruh aktor pendidikan.

Kondisi Lingkungan Sosial, Budaya, dan Politik Implementasi Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Akhlak pada Siswa

Implementasi Bimbingan dan Konseling (BK) dalam pembinaan akhlak di SMA PGRI 22 Serpong berlangsung dalam konfigurasi sosial yang bersifat heterogen, yang secara substantif memengaruhi diferensiasi internalisasi nilai moral siswa. Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif ekologi perkembangan yang menempatkan individu sebagai hasil interaksi antara mikrosistem keluarga, mesosistem sekolah, dan eksosistem sosial yang lebih luas

(Bronfenbrenner). Dalam konteks empiris penelitian, siswa membawa konstruksi nilai yang beragam dari lingkungan keluarga, baik yang bersifat otoritatif-disipliner maupun permisif-liberal.

Variasi pola asuh tersebut menghasilkan disparitas tingkat kedewasaan moral dan kepatuhan normatif di lingkungan sekolah. Siswa dengan latar keluarga disiplin cenderung menunjukkan stabilitas perilaku sosial, sementara siswa dengan pola asuh longgar memperlihatkan kebutuhan intervensi konseling yang lebih intensif, individual, dan berkelanjutan. Kondisi ini mengafirmasi bahwa implementasi BK tidak dapat diposisikan sebagai mekanisme homogen, melainkan sebagai praktik pedagogis diferensial yang menuntut sensitivitas kontekstual dan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based counseling approach). Perspektif konseling humanistik, guru BK berperan sebagai fasilitator perkembangan yang mengedepankan empati, penerimaan tanpa syarat, serta pemahaman subjektivitas pengalaman siswa. Dengan demikian, pembinaan akhlak tidak semata berorientasi pada koreksi perilaku, melainkan pada rekonstruksi nilai melalui relasi konseling yang terapeutik dan transformatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi BK sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antar aktor pelaksana kebijakan di lingkungan sekolah. Secara struktural, komunikasi vertikal antara kepala sekolah dan guru BK telah berlangsung relatif intensif melalui forum koordinatif dan diskusi programatik. Fungsi komunikasi ini berperan sebagai mekanisme alignment of vision dalam implementasi kebijakan pembinaan akhlak. Namun demikian, komunikasi horizontal antara guru BK dan guru mata pelajaran masih menunjukkan keterbatasan integratif. Kondisi ini menghasilkan fragmentasi peran dalam implementasi pendidikan karakter, di mana guru mata pelajaran cenderung berorientasi pada capaian kognitif, sementara guru BK lebih menitikberatkan pada aspek afektif dan moral. Disonansi orientasi tersebut menunjukkan adanya problem koordinasi implementatif dalam kerangka kebijakan pendidikan karakter yang seharusnya bersifat holistik-integratif.

Perspektif teori komunikasi organisasi, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya mekanisme koordinasi lintas fungsional (cross-functional communication) yang berimplikasi pada lemahnya shared understanding antar pelaksana kebijakan. Keterbatasan pemanfaatan media komunikasi digital juga memperkuat inefisiensi aliran informasi, khususnya dalam respons terhadap dinamika perilaku siswa yang bersifat situasional dan cepat berubah. Secara empiris, terdapat indikasi bahwa aksesibilitas siswa terhadap layanan BK masih dipengaruhi oleh stigma sosial dan hambatan psikologis. Sebagian siswa menunjukkan resistensi untuk mengakses layanan konseling akibat rasa malu, kekhawatiran terhadap judgment sosial, serta persepsi bahwa BK merupakan mekanisme korektif yang bersifat represif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa institusionalisasi BK sebagai ruang aman (safe therapeutic space) belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya sekolah. Dalam perspektif konseling modern, kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya transformasi paradigma BK dari pendekatan disipliner menuju pendekatan perkembangan (developmental counseling model). Akibatnya, fungsi preventif dan kuratif BK belum termanfaatkan secara maksimal dalam mendukung regulasi emosi dan perilaku siswa. Dimensi eksternal implementasi BK menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik dalam program pembinaan akhlak. Sebagian orang tua cenderung mengonstruksi pendidikan sebagai tanggung jawab eksklusif institusi sekolah, sehingga partisipasi dalam forum komunikasi dan evaluasi perkembangan siswa menjadi terbatas.

Perspektif teori sistem sosial pendidikan, kondisi ini menunjukkan terjadinya disfungsi mesosistem, yaitu lemahnya interaksi antara institusi keluarga dan sekolah. Ketidaksinambungan nilai antara lingkungan rumah dan sekolah berpotensi mengurangi efektivitas internalisasi nilai moral, karena proses pembentukan akhlak tidak didukung oleh konsistensi lingkungan sosial yang berkelanjutan. Keterbatasan kehadiran orang tua dalam forum komunikasi juga menghambat proses feedback loop dalam implementasi kebijakan BK, sehingga sekolah mengalami keterbatasan informasi dalam merumuskan intervensi yang tepat terhadap perkembangan perilaku siswa. Lingkungan eksternal siswa menunjukkan adanya penetrasi signifikan media digital yang berimplikasi pada perubahan pola perilaku dan orientasi nilai. Media sosial berperan sebagai agen sosialisasi sekunder yang memiliki daya penetrasi tinggi dalam membentuk persepsi, gaya hidup, dan pola interaksi siswa.

Secara sosiologis, kondisi ini mencerminkan terjadinya kompetisi nilai antara budaya lokal yang berbasis religius-tradisional dengan budaya digital-global yang bersifat terbuka dan cair.

Ketidakseimbangan ini menghasilkan tantangan serius dalam proses internalisasi akhlak, khususnya dalam konteks konsistensi nilai antara sekolah, keluarga, dan dunia digital. Dalam kerangka implementasi BK, fenomena ini menempatkan guru BK sebagai agen filtrasi nilai (value filtering agent) yang berfungsi membantu siswa dalam proses seleksi, internalisasi, dan negosiasi nilai. Dengan demikian, BK tidak hanya berperan sebagai layanan konseling individual, tetapi juga sebagai instrumen edukasi literasi moral digital. Secara kelembagaan, implementasi BK di SMA PGRI 22 Serpong menunjukkan adanya pola kolaborasi lintas aktor yang melibatkan kepala sekolah, guru BK, guru Pendidikan Agama Islam, wali kelas, serta unsur pendukung lainnya. Kolaborasi ini merepresentasikan model pendidikan karakter berbasis integrasi nilai akademik dan religius.

Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia BK serta keterbatasan fasilitas pendukung menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementatif. Dalam perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai deviasi antara standar kebijakan dan kinerja aktual akibat keterbatasan sumber daya dan komunikasi organisasi. Secara keseluruhan, implementasi BK dalam pembinaan akhlak di SMA PGRI 22 Serpong memperlihatkan karakteristik sistemik yang kompleks, di mana efektivitasnya ditentukan oleh interaksi multidimensional antara faktor sosial siswa, komunikasi organisasi, keterlibatan orang tua, serta dinamika budaya digital. BK dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai layanan bantuan psikologis, tetapi juga sebagai mekanisme rekayasa sosial pendidikan karakter yang menuntut konsistensi nilai lintas sistem sosial. Dengan demikian, keberhasilan implementasi BK sangat bergantung pada penguatan integrasi komunikasi antar pelaksana kebijakan, peningkatan partisipasi keluarga, optimalisasi literasi digital siswa, serta penguatan kapasitas kelembagaan BK sebagai pusat intervensi moral dan perkembangan peserta didik.

SIMPULAN

Standar dan Tujuan Implementasi BK dalam Pembinaan Akhlak Pelaksanaan BK diarahkan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya berkembang secara akademik tetapi juga memiliki moral dan karakter yang kuat. Strategi yang diterapkan meliputi pendekatan praktis, pemberian motivasi, serta penggunaan media edukatif yang menarik. Kepala sekolah menegaskan bahwa dukungan dari seluruh elemen sekolah sangat penting agar program ini mencapai efektivitas maksimum.

Sumber Daya (Resources), sumber daya manusia,Peran Guru BK dan Guru Pendidikan Agama Islam Kolaborasi antara guru BK dan guru Pendidikan Agama Islam sangat vital dalam membina moral siswa. Kedua bidang ini saling mendukung melalui kegiatan seperti ceramah, kegiatan keagamaan, dan pendekatan individual ataupun kelompok. Guru berperan sebagai panutan, motivator, dan pendidik yang mampu menyesuaikan strategi dengan karakter siswa yang beragam.

Karakteristik Organisasi Pelaksana (Characteristics of Implementing Agencies) merupakan Strategi Pengembangan Moral dan Pembinaan Akhlak Implementasi program dalam konteks ini menekankan pendekatan praktis dan pengalaman langsung. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan melalui kegiatan keagamaan, diskusi moral, penggunaan media seperti gambar dan proyektor, serta aktivitas spiritual yang rutin. Pendekatan ini menimbulkan minat siswa terhadap nilai-nilai moral, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan hormat.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan (Inter-organizational Communication and Enforcement Activities) sebagai penggunaan teknologi dan media dalam pembinaan moral teknologi modern seperti media sosial dan platform daring digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi moral dan keagamaan secara efektif. Melalui penyebaran informasi tentang perkembangan terkini dan penguatan nilai moral, siswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Allan al-Sadiqi, Muhammad, Syarah Kitab Tauhid (Beirut: Lubnan, 1995), h. 76 148. 2006), h. 129.
Achmadi, Islam Paradigma Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), h. 83.
Afifuddin dan Saebani, Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009),h. 17.

Al-Abrasyi, Athiyah, Muhammad, Dasar-Dasar Pendidikan Islam (Jakarta:Bulan Buntang, 1970),h. 73.
Al-Ghazali, Imam, Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia (Bandung: Mizan, 2015),h. 58.
Al-Nahlawi, Abdurahman , Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 263.
Al-Qutubi, Tafsir Al-Qurtubi, terj.Mahmud Hamid Usman (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), h. 670.
Al-Rasyidin, Percikan Pemikiran Pendidikan dari Filsafat Hingga Praktik Pendidikan (Bandung: Citra Pustaka, 2009), h. 148
Amin, Ahmad, Etika (Ilmu Akhlak) (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 5 Andi Mappiare, Psikologi Remaja., h. 68.
Arifin, Anwar, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),h.5.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
Azizah, A., & Eliza, D. (2021). Jurnal Basicedu, 5(2), 717–723
Azra, Azyumardi , Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1998)
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158
Ibnu Maskawaih, Tahdzib al-Akhlak, terj. Helmi Hidayat, Menuju Kesempurnaan Akhlak (Bandung: Mizan, 1994), h. 62.
Bogdan dan Taylor, Steven J. Dasar-Dasar Penelitian (Surabaya: Usaha Nasional, cet. 2,1993), h. 30.
Bogdan, Robert C. dan Biklen, Sari Knop Riset Kualitatif Untuk Pendidikan (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 28.
Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Putra Grafika, 2007), h. 115.
Darajat, Zakiyah, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama, 1985), h. 10-11. Data Kualitatif (Depok: PT. Rajadrafindo Persada, 2015), h. 31.
Depdikbud, Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menegah (Jakarta: Depdikbud, 1990), h.15.
Depdikbud, Undang-Undang Republik Indonesia, No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1989), h. 4.
Djumhur dan Moh Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: Ilmu, 1987)
Djumhur dan Surya, BK di Sekolah (Bandung: CV Ilmu, 1975), h. 15. Hakim (2019) Jurnal Pendidikan Islam, h 69.
Hallen, BK (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), h.3. Hallen, BK (Jakarta: Ciuptat Pers, 2002)
Hambal, Ibnu, Ahmad, Musnad Imam Ahmad terj. Syekh Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azam, 2009)
Herdiansyah, Haris, Wawancara, Observasi, dan Fokus Grup Sebagai Instrumen Penggalian
Huberman, Miles dan Saldana J. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009),
Julitriarsa dan Suprihanto, Manajemen Umum Sebuah Pengantar, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2008)
Kartono, Kartini, Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksananya (Jakarta: Rajawali, 1985
Kemendikbud, Permendikbud No 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).
Kulsum, Siti, —Peranan BK dalam Domain Pengembangan Diri Siswa,‖ dalam Konseling, Vol. I, edisi 06 Januari 2013, h. 67.
Lubis, Akhyar, Saiful, Konseling Islami Dalam Komunitas Pesantren (Bandung: Ciptapustaka Media, cet.1, 2015), h. 91-97.
Manan, Syaepul Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan Dan Pembiasaan Dalam Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. XV, edisi 01 Maret 2017., h. 226.
Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia (Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika Dalam Islam) (Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009), h. 9.
Moleong, LeXIy J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, cet 2, 2005

Mubarok, Achmad, Al-Irsyad An-Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), h. 43.
Mukniah, Materi Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 3.
Munandir, Beberapa Pikiran Mengenai BK Islami (Yogyakarta: UII, 1997), h. 101-102.
Munir, Samsul, BK Islam (Jakarta: Amzah, 2013), h. 5.
Mustofa, Ahmad, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 1997) Nasrullah, Rulli —Oerundungan Siber (cyberbullying) di Status Facebook Divisi
Humas Mabes Polri, dalam Sosioteknologi, Vol. XIV, edisi 01 April 2015
Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2008), h. 10.
Nurihsan, Juntika, Achmad, Bimbingan Konseling Dalam Berbagai Latar Belakang Kehidupan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 8.
Prayitno, Amti, Emran, Dasar-Dasar Dalam BK (Jakarta: Rineka Cipta, 1994
Prayitno, Seri Pemandu Pelayanan BK Sekolah Menengah Kejuruan : SMK. (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 1977), h. 12
Rahma, Hibana, BK Pola 17 (Yogyakarta: UCY Press, 2003), h. 13.
Rohidi, Rohindi, Panduan Analisis Metode Data Kualitatif (Jakarta: UI-Press, 2014)
Salminawati, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011) Sanjaya, Wina, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 250.
Sapril, —Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam pembinaan Akhlak Siswa SMP Negeri 1 Pagar Jati Bengkulu Tengah‖ (Tesis, Program Pascasarjana STAIN Bengkulu, 2011), h. 65.
Sitorus, Masganti, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Medan: IAIN Press, 2011
Slameto, Bimbingan di Sekolah (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 2.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Cet. Ke 12 (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 76. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012),
Sukardi, Ketut, Dewa, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 79.
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 78.
Sulaiman, Hasan, Fathiyah, Konsep Pendidikan Al-Ghazali (1998)
Sultoni, Dalimunte, Sehat —Persfektif Alquran Tentang Pendidikan Akhlak,‖ dalam
Suryabrata, Sumadi, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93. Syamsu dan Nurihsan, Landasan Bimbingan ……, h. 22-24.
Thoha, Chabib, Metodologi Pengajaran Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 136.
Tohirin, BK di Sekolah dan sekolah Berbasis Integrasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Uhbiyati, Nur, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. 2, 1998) Umari, Barnawy, Materi Akhlak (Solo: Ramadhani, 1984), h. 2.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003)
Usman, Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002)
W.S Winked, BK di Sekolah Menengah (Jakarta: PT. Grasindo, 1991), h. 28. Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: CV Andi, 2010), h. 7. Willis, Sofyan, Konseling Individual Teori dan Praktek (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 1.
Yusuf dan Nurihsan, Landasan BK (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
Yusuf, Muri, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitan Gabungan (Jakarta:Prenadamedia Group: 2017), h. 329.
Zainuddin, Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak) (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 77-78.
Zubaedi, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) Zuriah, Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)